

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Pengertian Teori	18
2.1.2 Teori Pidana	23
2.1.3 Teori Efektifitas Sistem Hukum	31
2.2 Landasan Konseptual	35
2.2.1 Sejarah Notaris	35
2.2.2 Pengertian Notaris	36
2.2.3 Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	38
2.2.4 Pengertian Tindak Pidana Perpajakan	44
2.2.5 Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan	47
2.2.6 Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Sesuai UU KUP	55
BAB III : METODE PENELITIAN	62
3.1 Metode Penelitian	62
3.2 Jenis Penelitian	63
3.3 Pendekatan Penelitian	64

3.4 Bahan Hukum	67
3.5 Teknik Pengumpulan Data	68
BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN	69
4.1 Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Dalam Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	69
4.1.1 Pokok-pokok Pengaturan Mengenai Pembayaran PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	69
4.1.2 Hak dan Kewajiban Notaris Sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)	75
4.1.3 Tindak Pidana menurut KUHP dan Undang-Undang Perpajakan	79
4.1.4 Temuan Penelitian dalam Peraturan Penyetoran PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	86
4.1.5 Kelemahan dalam Pengaturan mengenai Penyetoran PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	88
4.2 Pelaksanaan Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Dalam Melakukan Pembayaran PPh kepada Negara Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Guna Mengoptimisasi Penerimaan Pajak	88
4.2.1 Kronologi Kasus Penyimpangan Kewajiban Pembayaran PPh	88
4.2.2 Uraian Penanganan Kasus Di Lembaga Peradilan	95
4.2.3 Analisa Implementasi Peraturan Pembayaran PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	98
4.2.4 Temuan Hasil Penelitian	99
4.2.4.1 Kelemahan Dalam Mekanisme Penyetoran Pajak	99
4.2.4.2 Faktor Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat	100
4.2.5 Evaluasi Implementasi Peraturan Pembayaran PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan	102

BAB V : PENUTUP	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran/Rekomendasi	104
DAFTAR PUSTAKA	106

